

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II s.d 31 Mei Tahun 2024 menunjukkan bahwa perlu dilakukan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah;
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan asumsi keuangan daerah serta menyesuaikan permasalahan Perangkat Daerah dengan kondisi terkini.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.4. Sistematika

Sistematika penulisan Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2024

Evaluasi Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II dilakukan terhadap penilaian realisasi DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sampai dengan 31 Mei 2024. Evaluasi Renja tersebut digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.

Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan 31 Mei Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan 31 Mei Tahun 2024

Nama Perangkat Daerah: Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Progam/Kegiatan/Sub Kegiatan	Satua n	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024		Realisasi Kinerja dan Anggaran Tahun 2024 s.d Triwulan				Tingkat Realisasi (%) s.d Triwulan II		Kendala yang Dihadapi
						I		II (s.d 31 Mei)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)		(7)		(8) = (7)/(5b)		(9)
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN											
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi yang diprakondisi	Persen	25	120,000,000	0	-			0	0	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	Cakupan lokasi yang prakondisi	Persen	25	120,000,000	0	-			0	0	
	Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	Jumlah dokumen Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya	dokumen	1	120,000,000	0	-			0	0	Menunggu BA redesain, kegiatan akan dilaksanakan di bulan Juni dan rencana selesai di bulan September
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Capaian Nilai Evaluasi Kinerja	angka	87	3,737,954,648	21,26	790,893,025	38	1,433,303,441	44,07	38,34	
08.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Caapaian kinerja perencanaan Pengannggaran evaluasi kerja perangkat daerah	persen	100	35,000,000	49	9,250,000	57	20,090,000	57,40	57,40	
08.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	dok	4	19,400,000	2	9,250,000	2	9,250,000	50,00	47,68	Secara fisik sudah selesai, efisiensi akan dipergunakan untuk penyusunan RKPD perubahan
08.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD	dok	1	5,600,000	0	-	0	850,000	0,00	15,18	Pekerjaan selesai di akhir tahun
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	dok	1	10,000,000	0	-	1	9,990,000	100,00	99,90	
8.01.01.2.02	Administrtasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji ASN dan Tunjangan Kinerja	persen	100	3,321,294,926	25	662,639,673	37	1,213,180,811	36,53	36,53	

8.01.01.2 .02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ob	20	3,154,814,926	5	618,689,673	7	1,164,180,811	35,00	36,90	Sesuai rekomendasi dari BPKPAD, anggaran kas di masukkan di Triwulan II
8.01.01.2 .02.05	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	dok	2	117,480,000	1	43,950,000	1	43,950,000	50,00	37,41	
8.01.01.2 .02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulanan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	dok	16	49,000,000	3	-	6	5,050,000	37,50	10,31	Banyaknya kegiatan/laporan yang harus diselesaikan sementara jumlah SDM terbatas
8.01.01.2 .06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja pengelolaan Adm Umum	persen	100	344,719,514	15	53,259,000	32	111,839,500	32,44	32,44	
8.01.01.2 .06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	6	3,000,000	0	-	3	1,500,000	50,00	50,00	
x.xx.01.2. 06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan & perlengkapan yang tersedia	paket	1	32,100,149	0	1,800,000	0	13,300,000	0,00	41,43	Sebagian besar persediaan barang masih ada, kurang tepat dalam penempatan anggaran kas
x.xx.01.2. 06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan pengadaan yang disediakan	paket	6	27,868,365	1	1,800,000	1	1,800,000	16,67	6,46	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
x.xx.01.2. 06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan Peraturan Prundang-undangan	Paket	12	3,000,000	0	-	0	-	0,00	-	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
8.01.01.2 .06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	Paket	30	7,500,000	30	7,500,000	30	7,500,000	100,00	100,00	
x.xx.01.2. 06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat yang dan koordinasi yang terlaksana	laporan	390	271,251,000	61	42,159,000	126	87,739,500	32,35	32,35	
x.xx.01.2 .07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	persen	100	33,600,000	0	-	-	-	0,00	-	
x.xx.01.2. 07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	4	33,600,000	0	-	0	-	0,00	-	Terjadi pergantian PPK sehingga proses pengadaan mundur
x.xx.01.2 .08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	59,950,728	18	10,865,852	38	22,664,630	37,81	37,81	
x.xx.01.2. 08.01	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	lap	1	3,000,000	0	500,000	0	500,000	0,00	16,67	Pembelian materai sesuai kebutuhan bulanan
x.xx.01.2. 08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	lap	1	4,328,000	0	1,500,000	0	-	0,00	-	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
x.xx.01.2. 08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	lap	24	52,622,728	4	8,865,852	10	22,164,630	42,12	42,12	
8.01.01.2 .09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian pengelolaan administrasi umum	persen	100	339,000,000	16	54,878,500	19	65,528,500	19,33	19,33	

8.01.01.2 .09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	209,000,000	4	49,285,000	5	59,935,000	28,68	28,68	Efisiensi anggaran (bbm, service)
8.01.01.2 .09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	16	10,000,000	2	1,493,500	2	1,493,500	14,94	14,94	Pembayaran Pajak disesuaikan dengan berakhir masa berlaku pajak
8.01.01.2 .09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	15	7,500,000	0	-	0	-	0,00	-	Proses identifikasi kondisi mebel yang akan dilakukan perbaikan
8.01.01.2 .09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang terpelihara	unit	20	17,500,000	7	4,100,000	4	4,100,000	18,74	23,43	Pemeliharaan disesuaikan dengan kondisi peralatan yang ada
8.01.01.2 .09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	95,000,000	0	-	0	-	0,00	-	Pekerjaan baru tahap identifikasi, akan dilakukan perubahan spesifikasi pada saat anggaran perubahan
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan sekolah dalam pemahaman wawasan kebangsaan	Persen	100	993,089,000	1	5,400,000	13	133,331,920	13,43	13,43	
8.01.02.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Cakupan pembinaan wawasan kebangsaan	persen	100	993,089,000	1	5,400,000	13	133,331,920	13,43	13,43	
8.01.02.2 .01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	50	25,000,000	0	-	-	-	0,00	-	Pelaksanaan Kegiatan mundur d Triwulan III mengingat padatnya agenda di Triwulan II
8.01.02.2 .01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	orang	1300	968,089,000	8	5,400,000	179	133,331,920	13,77	13,77	Beberapa sub aktivitas akan dilaksanakan bulan Juni 2024 seperti pendidikan wawasan kebangsaan Anggaran Paskibraka menunggu pengumuman dari Pusat
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Cakupan kelurahan dalam pemahaman berdemokrasi	Persen	100	34,089,635,200	1	198,407,000	93	31,672,591,300	92,91	92,91	
8.01.03.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,	Cakupan kalurahan dalaam pemahaman demokrasi	persen	100	34,089,635,200	1	198,407,000	93	31,672,591,300	92,91	92,91	

	Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik											
8.01.03.2 .01.03	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	orang	3700	34,089,635,200	22	198,407,000	3,438	31,672,591,300	92,91	92,91	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas	Persen	28	300,000,000	2,24	22,162,740	7	77,145,520	25,72	25,72	
8.01.04.2 .01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan pembinaan Ormas	persen	28	300,000,000	2,24	22,162,740	7	77,145,520	25,72	25,72	
8.01.04.2 .01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	orang	500	300,000,000	40	22,162,740	129	77,145,520	25,72	25,72	Pelatihan peningkatan kapasitas SDM Ormas akan dilaksanakan di bulan Juni
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan antar umat beragama	Persen	100	617,288,500	7	38,598,000	25	156,939,500	25,42	25,42	
08.01.05. 2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB aktif	persen	100	617,288,500	7	38,598,000	25	156,939,500	25,42	25,42	
08.01.05. 2.0.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	orang	1875	617,288,500	117	38,598,000	477	156,939,500	25,42	25,42	Sebagian kegiatan Pokir menunggu jadwal dari Dewan FKUB akan dilaksanakan bulan Juni P4GN akan dikoordinasikan dengan BNND
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	Persen	100	396,709,000	5	19,812,500	20	78,062,500	19,68	19,68	
08.01.06. 2.01.	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD	persen	100	396,709,000	5	19,812,500	20	78,062,500	19,68	19,68	

08.01.06. 2.01.04	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	dokumen	1	6,375,000	0	1,062,500	0	1,062,500	16,67	16,67	Beberapa sub aktivitas akan dilaksanakan bulan Juni 2024 Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
08.01.06. 2.01.02	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	orang	500	285,334,000	15	6,550,000	78	44,480,000	15,59	15,59	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
8.01.06.2 .01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	105,000,000	0	12,200,000	0	32,520,000	30,97	30,97	Dalam proses penyelesaian administrasi keuangan
	Jumlah				40,650,286,868		1,075,273,265	197	33,551,374,181		82,54	
	Rata-rata capaian kinerja (%)						2.7		82.5			

Berdasarkan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 sampai dengan 31 Mei 2024, ditemukan beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a. Keterlambatan Sub Kegiatan Pembangunan Ketahanan Sosial Budaya dikarenakan masih menunggu berita acara redesain Dais. Setelah BA diterima kegiatan akan segera dilaksanakan dan direncanakan selesai triwulan III;
- b. Tingkat kualitas dan kuantitas SDM masih rendah, terkendala proses penatausahaan keuangan terkait penggunaan aplikasi dari Simral ke SIPD;
- c. Terkendala proses administrasi keuangan;
- d. Kurangnya SDM untuk melaksanakan pekerjaan;
- e. Terjadi pergantian PPK sehingga proses pengadaan mundur.

Permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 tersebut, menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan yang akan ditempuh sampai dengan Triwulan IV dan menjadi salah satu dasar penyusunan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Perubahan Tahun 2024 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Perumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan pada Perubahan Tahun 2024 mendasarkan pada permasalahan yang dihadapi sampai dengan 31 Mei 2024 dan kebutuhan prioritas yang harus ditindaklanjuti.

Rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)																								
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BANTUL																								
TAHUN 2024																								
No	Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Realisasi Capaian RENJA OPD Tahun 2022	Prakiraan Capaian Target RENJA OPD Tahun 2023	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
											Target 2024		Pagu Indikatif (Rp)				Lokasi	Sumber Dana		Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)
											Sebelum	Sesudah	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024	Bertambah /Berkurang				Nasional	Daerah			
1	2	3					4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
						Badan Kesatuan Bangsa dan Politik							57.502.140.683,00	40.254.676.348,00	40.750.286.868,00	495,610,520.00						8.911.563.500,00		
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							270.752.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-						350.000.000,00		
	2	2	2			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							270.752.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-						350.000.000,00		
1	2	2	0	8		PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Cakupan Lokasi Yang diprakondisi				-	25 Persen	270.752.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	-						350.000.000,00		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				12 Doku men	12 Doku men	3.000.00 0,00	3.000.00 0,00	1.400.00 0,00	- 1,600,000. 00	Kab. Bantu I, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelaya nan Publik	Pema ntapa n Layan an Publik Berba sis Tekno logi Infor masi			3.500.00 0,00	BADA N KESAT UAN BANG SA DAN POLITI K
	8	0 1	0 1	2. 0 6	00 07	Penyediaan Bahan/Material																		
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				400 Paket	400 Paket	3.000.00 0,00	7.500.00 0,00	7.500.00 0,00	-	Kab. Bantu I, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelaya nan Publik	Pema ntapa n Layan an Publik Berba sis Tekno logi Infor masi			3.000.00 0,00	BADA N KESAT UAN BANG SA DAN POLITI K
	8	0 1	0 1	2. 0 6	00 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				0 Lapor an	390 Lapor an	365.691. 000,00	271.251. 000,00	272.569. 000,00	1,318,000. 00	Kab. Bantu I, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelaya nan Publik	Pema ntapa n Layan an Publik Berba sis Tekno logi Infor masi			367.000. 000,00	BADA N KESAT UAN BANG SA DAN POLITI K

[illegible]

							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Lapor an	1 Lapor an	3.000.00 0,00	3.000.00 0,00	1.200.00 0,00	- 1,800,000. 00	Kab. Bantu I, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelaya nan Publik	Pema ntapa n Layan an Publik Berba sis Tekno logi Infor masi			4.000.00 0,00	BADA N KESAT UAN BANG SA DAN POLITI K	
	8	0 1	0 1	2. 0 8	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Lapor an	1 Lapor an	4.328.00 0,00	4.328.00 0,00	1.328.00 0,00	- 3,000,000. 00	Kab. Bantu I, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	Memp erkuat Stabilit as Polhuk hanka m Dan Transfo rmasi Pelaya nan Publik	Pema ntapa n Layan an Publik Berba sis Tekno logi Infor masi			6.000.00 0,00	BADA N KESAT UAN BANG SA DAN POLITI K	
	8	0 1	0 1	2. 0 8	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																			
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				24 Lapor an	24 Lapor an	70.382.7 28,00	52.622.7 28,00	52.611.7 86,00	- 10,942.00	Kab. Bantu I, Semu a Keca mata n, Semu a Kel/D esa	PENDA PATAN ASLI DAERA H (PAD) Dana Transf er Umum -Dana Alokasi Umum	-	Pema ntapa n Layan an Publik Berba sis Tekno logi Infor masi			75.000.0 00,00	BADA N KESAT UAN BANG SA DAN POLITI K	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					3700.00 Orang	3700.00 Orang	50.913.986.400,00	34.089.635.200,00	34.097.367.200,00	7,732,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mempertuastabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			1.500.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	
5	8	01	04				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Pembinaan Ormas				-	28 persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-								300.000.000,00	
	8	01	04	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Cakupan Pembinaan Ormas	-			-	28 persen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-			Mempertuastabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Kelompok Masyarakat			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

	8	0	0	2.	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah																		
				1	03		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah				500.00 Orang	500.00 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mempertuastabilitas Polhuk hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi			300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	8	01	05			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Kerukunan Antar Umat Beragama				-	100 persen	648.720.500,00	617.288.500,00	587.579.500,00	- 29,709,000.00							800.000.000,00	
	8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	FKUB Aktif	-			-	100 persen	648.720.500,00	617.288.500,00	617.288.500,00	-			Mempertuastabilitas Polhuk hankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemantapan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	masyarakat		800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	05	2.01	00	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah																		

							Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah					1875.00 Orang	1875.00 Orang	648.720.500,00	617.288.500,00	587.579.500,00	- 29,709,000.00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mempertahankan Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				800.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	8	01	06				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase penanganan permohonan pengkondisian masyarakat yang diminta oleh PD				-	100 persen	417.897.500,00	396.709.000,00	399.009.000,00	2,300,000.00								455.063.500,00	
	8	01	06	2.01			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penangan	Penyusunan bahan Kewaspadaan Dini berkaitan dengan Notifikasi Permintaan OPD	-			-	100 persen	417.897.500,00	396.709.000,00	396.709.000,00	-			Mempertahankan Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	Masyarakat			455.063.500,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah				500 Orang	500 Orang	277.834.000,00	285.334.000,00	287.634.000,00	2,300,000.00	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mempertkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				300.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																			
							Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00	-	Kab. Bantul, Semu a Kecamatan, Semu a Kel/Desa	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Mempertkuat Stabilitas Polhukam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Pemanfaatan Layanan Publik Berbasis Teknologi Informasi				120.000.000,00	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	J U M L A H												57.502.140.683,00	40.254.676.348,00	40.750.286.868,00	495,610,520.00							8.911.563.500,00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Selanjutnya, Perubahan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 akan menjadi pedoman dalam menyusun Perubahan RKA SKPD Tahun 2024.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

STEPHANUS HERU WISMANTARA,SIP.MM
NIP.196512261986021001